



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 14 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 26 TAHUN 2016
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Pemalang dan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Pemalang dan Indikator Kinerja Utama Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 – 2021 sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
 - b. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang, Organisasi Perangkat Daerah mengalami perubahan urusan, kewenangan, tugas dan fungsi sehingga indikator kinerja utama Perangkat Daerah juga berubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 26 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Pemalang dan Indikator Kinerja Utama Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 – 2021 perlu disesuaikan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 26 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Pemalang dan Indikator Kinerja Utama Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

11. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2006 Nomor 13);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pemalang;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 12);
20. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang;
21. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang;
22. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Staf Ahli Bupati Pemalang;
23. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang;
24. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Pemalang;

25. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang;
26. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang;
27. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang;
28. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang;
29. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang;
30. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang;
31. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 55 Tahun 2016 tentang **Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaam Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pemalang;**
32. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang;
33. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pemalang;
34. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang;
35. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang;
36. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang;
37. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang;

38. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang;
39. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang;
40. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Pemalang;
41. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang;
42. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang;
43. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang;
44. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang;
45. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang;
46. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang;
47. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang;
48. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pemalang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 26 TAHUN 2016 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2016-2021.

Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah dan IKU Organisasi sampai dengan tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 dan Lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR /TAHUN 2017

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 26 TAHUN 2016 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2016 – 2021

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2016 – 2021

Misi 1: Meningkatkan akses masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah berdasarkan azas musyawarah mufakat, dan gotong royong.

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		PROGRAM
					FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah, serta pelaporan kinerja pemerintah daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dan pelaporan kinerja pemerintah daerah	Tingkat keselarasan antara program RKPD dengan RPJMD	%	$\frac{\text{Jumlah Program \& Kegiatan yang tercantum dalam RKPD}}{\text{Jumlah Program \& Kegiatan yang tercantum dalam RPJMD}} \times 100 \%$	Bappeda	1. Program perencanaan pembangunan daerah 2. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
			Nilai LkjIP	Nilai		Nilai LKjIP	
			Persentase Prioritas Usulan Hasil Musrenbang yang diakomodir dalam RKPD	%	$\frac{\text{Jumlah usulan kegiatan prioritas yang terhimpun dalam Musrenbang}}{\text{Jumlah usulan kegiatan yang tercantum dalam RKPD}} \times 100 \%$	Bappeda	

Misi 2: Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan, derajat kesehatan masyarakat, keluarga berencana, serta peningkatan keberdayaan perempuan, perlindungan sosial dan anak

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		PROGRAM
					FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Meningkatkan kualitas dan pelayanan pendidikan yang merata, terjangkau dan berkeadilan	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menempuh pendidikan pada jenjang PAUD dan pendidikan dasar serta pendidikan non formal	Rata-rata lama sekolah	Tahun	$\frac{\text{Jumlah penduduk berijazah per jenjang pendidikan} \times \text{lama pendidikan per jenjang pendidikan}}{\text{Jumlah penduduk}}$	Dindikbud	1. Program PAUD 2. Program pendidikan Dasar 9 Tahun 3. Program Pendidikan Nonformal 4. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 5. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
			Harapan lama sekolah	Tahun	$HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$	Dindikbud	
			Angka Kelulusan SD/MI	%	$\frac{\text{Jumlah Siswa Tingkat Tertinggi pada Jenjang SD/MI}}{\text{Jumlah Siswa Tingkat Tertinggi pada Jenjang SD/MI pada tahun sebelumnya}} \times 100\%$	Dindikbud	
			Angka Kelulusan SMP/Mts	%	$\frac{\text{Jumlah Siswa Tingkat Tertinggi pada Jenjang SMP/Mts}}{\text{Jumlah Siswa Tingkat Tertinggi pada Jenjang SMP/Mts pada tahun sebelumnya}} \times 100\%$	Dindikbud	
			Angka Melanjutkan SD/MI	%	$\frac{\text{Murid baru Kelas 1 SMP atau sederajat pada Tahun } t1}{\text{Lulusan SD atau sederajat pada Tahun } t0} \times 100\%$ <p><i>Ket:</i> <i>t1 : tahun tertentu</i> <i>t0 : tahun sebelumnya</i></p>	Dindikbud	

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		PROGRAM
					FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Angka Melanjutkan SMP/MTs	%	$\frac{\text{Murid baru Kelas 1 SMA atau sederajat pada Tahun } t1}{\text{Lulusan SMP atau sederajat pada Tahun } t0} \times 100\%$ <p><i>Ket:</i> <i>t1 : tahun tertentu</i> <i>t0 : tahun sebelumnya</i></p>	Dindikbud	
		Meningkatnya kunjungan masyarakat ke perpustakaan	Angka kunjungan ke perpustakaan	%	$\frac{\text{Jumlah kunjungan ke perpustakaan tahun } n}{\text{Jumlah kunjungan ke perpustakaan tahun } (n - 1)} \times 100\%$	Dinpusarda	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 2. Program pembinaan dan peningkatan kapasitas perpustakaan 3. Program penyelamatan dan pelestarian koleksi perpustakaan
3.	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup	Tahun	$\frac{\text{Jumlah usia penduduk meninggal}}{\text{Jumlah penduduk yang meninggal}}$	Dinkes	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru-paru / Rumah sakit mata 2. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 3. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 4. Program Pengawasan Obat dan Makanan 5. Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat 6. Program Perbaikan Gizi Masyarakat 7. Program pengembangan lingkungan sehat 8. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 9. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 10. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasaana puskesmas pembantu dan jaringannya
			Angka Kematian Ibu	Kasus	$\frac{\text{Jumlah kematian ibu}}{\text{Jumlah kelahiran hidup dalam waktu yang sama}} \times 1.000$	Dinkes	
			Angka Kematian Bayi	Per 1.000 KH	$\frac{\text{Jumlah kematian bayi sebelum usia 1 tahun}}{\text{Jumlah kelahiran hidup dalam waktu yang sama}} \times 1.000$	Dinkes	
			Angka Kematian Balita	Per 1.000 KH	$\frac{\text{Jumlah kematian anak 1 - 4 tahun}}{\text{Jumlah anak 1 - 4 tahun dalam waktu yang sama}} \times 1.000$	Dinkes	

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		PROGRAM
					FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Persentase Balita Gizi Buruk	%	$\frac{\text{Jumlah kasus lama + baru balita gizi buruk yang tercatat di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah balita di 1 wilayah pada kurun waktu yang sama}} \times 100\%$	Dinkes	<ol style="list-style-type: none"> 11. Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 12. Program peningkatan kesehatan lansia 13. Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan 14. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 15. Program peningkatan kualitas pelayanan kesehatan pada BLUD 16. Program peningkatan pelayanan kesehatan perorangan melalui JKN 17. Program peningkatan pelayanan kesehatan anak dan remaja 18. Program pengendalian penyakit tidak menular 19. Program pengembangan Sistem Informasi Kesehatan
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam ber-KB	Total Fertility Rate (TFR)	%	$\frac{\text{Jumlah peserta Program KB aktif pada tahun } n}{\text{Jumlah PUS pada tahun } n} \times 100\%$	Dinsos KBPP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Keluarga Berencana 2. Program pelayanan kontrasepsi 3. Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR 4. Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga 5. Program reproduksi kesehatan remaja 6. Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB 7. Program peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS, HIV AIDS 8. Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		PROGRAM
					FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	
1	2	3	4	5	6	7	8
4.	Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan daerah	Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan partisipasi perempuan dalam ranah publik	Indeks Pembangunan Gender	Nilai	$IPJ = 1/3 (Xade(1) + Xade(2) + I inc-dis)$ <p>Ket : <i>X ade(1) = X ade untuk harapan hidup</i> <i>X ade(2) = X ade untuk pendidikan</i> <i>I inc-dis = Indeks distribusi pendapatan</i></p>	Dinsos KBPP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak 2. Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan 3. Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan
			Indeks Pemberdayaan Gender	Nilai	$IDJ = 1/3 (I par + I dm + I inc-dis)$ <p>Ket : <i>I par = Indeks Keterwakilan di Parlemen</i> <i>I dm = Indeks Pengambilan keputusan</i> <i>I inc-dis = Indeks distribusi Pendapatan</i></p>	Dinsos KBPP	
5.	Meningkatkan perlindungan sosial terhadap PMKS	Meningkatnya penanganan pemberian jaminan sosial bagi PMKS	Persentase PMKS yang tertangani	%	$\frac{\text{Jumlah PMKS yang memperoleh Jaminan sosial dalam 1 tahun}}{\text{Jumlah PMKS skala kabupaten yang seharusnya menerina Jaminan Sosial}} \times 100\%$	Dinsos KBPP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 2. Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma 3. Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo 4. Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) 5. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 6. Program pembinaan anak terlantar 7. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 8. Program darurat bencana dan logistik

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		PROGRAM
					FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	
1	2	3	4	5	6	7	8
							9. Program rehabilitasi dan rekonstruksi penanggulangan bencana
		Meningkatnya cakupan kepemilikan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Persentase kepemilikan KTP	%	$\frac{\text{Jumlah penduduk usia lebih dari 17 tahun yang ber - KTP}}{\text{Jumlah penduduk usia lebih dari 17 tahun atau yang telah menikah}} \times 100\%$	Disdukcatpil	1. Program Administrasi Kependudukan
			Persentase Anak memiliki Akta Kelahiran	%	$\frac{\text{Jumlah anak (0 - 18 tahun) yang memiliki akte kelahiran}}{\text{Jumlah penduduk usia 0 - 18 tahun}} \times 100\%$	Disdukcatpil	

Misi 3: Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan kedaulatan pangan berbasis sumberdaya lokal serta menanggulangi kemiskinan dan pengangguran

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		PROGRAM
					FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	
1	2	3	4	5	6	7	8
6.	Meningkatkan tingkat kecukupan pangan masyarakat	Meningkatnya produktivitas pertanian dalam arti luas	Produktivitas padi	kw/ha	$\frac{\text{Produksi padi}}{\text{Luas arean tanaman padi}} \times 100 \%$	Dispertan	1. Program peningkatan kesejahteraan petani 2. Program peningkatan produksi pertanian/ perkebunan 3. Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan peternakan
			produktivitas jagung	kw/ha	$\frac{\text{Produksi jagung}}{\text{Luas arean tanaman jagung}} \times 100 \%$	Dispertan	4. Program peningkatan produksi hasil peternakan

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		PROGRAM
					FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	
1	2	3	4	5	6	7	8
			produktivitas Kedelai	kw/ha	$\frac{\text{Produksi kedelai}}{\text{Luas arean tanaman kedelai}} \times 100\%$	Dispertan	5. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 6. Program peningkatan penerapan teknologi peternakan 7. Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan
			Produksi Komoditas peternakan utama	kg	Jumlah populasi ternak yang ada	Dispertan	
		Meningkatnya ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	skor	$\frac{\% \text{ AKG energi masing - masing komoditas}}{\text{Angka kecukupan gizi}} \times 100\%$	Dispertan	
			Ketersediaan cadangan pangan	%	Jumlah tersedianya cadangan pangan dalam 1 tahun	Dispertan	
7.	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi	Meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat melalui peningkatan dan optimalisasi sektor usaha potensial di Kabupaten Pemalang	Pertumbuhan Ekonomi	%	$\frac{\text{Produk Domestik Bruto pada tahun } n - \text{Produk Domestik Bruto pada tahun } (n - 1)}{\text{Produk Domestik Bruto pada tahun } (n - 1)} \times 100\%$	Bappeda	1. Program Peningkatan produksi Pertanian/ Perkebunan 2. Program Peningkatan Penerapan teknologi Perkebunan 3. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 4. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/ perkebunan) 5. Program Pengembangan Perikanan Tangkap 6. Program Pengembangan Budidaya Perikanan 7. Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar 8. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil menengah Yang Kondusif 9. Program peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 10. Program peningkatan Kapasitas Dan penggunaan Iptek Dalam Sistem Produksi
			PDRB Per Kapita	Rp	$\frac{\text{PDRB}}{\text{Jumlah Penduduk}}$	Bappeda	
			Laju Inflasi	%	Laju Inflasi = $\frac{\text{IHK Periode } n - \text{IHK tahun sebelumnya}}{\text{IHK tahun sebelumnya}} \times 100$ $\text{IHK} = \frac{\text{Harga Sekarang}}{\text{Harga Tahun Dasar}} \times 100$ <i>IHK = Indeks Harga Konsumen</i>	Bappeda	

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		PROGRAM
					FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Indeks Gini	Indeks	$G = 1 - \sum (X_{i+1} - X_i)(Y_i + Y_{i+1})$ $G = 1 - \sum f_i(Y_i + Y_{i+1})$ <p>Ket : <i>G = Rasio Gini</i> <i>F_i = Proporsi jumlah rumah tangga dalam kelas i</i> <i>X_i = Proporsi jumlah kumulatif rumah tangga dalam kelas i</i> <i>Y_i = Proporsi jumlah pendapatan dalam kelas i</i></p>	Bappeda	11. Program pengembangan industri Kecil Dan menengah 12. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 13. Program pengembangan Destinasi Pariwisata 14. Program peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja 15. Program peningkatan Kesempatan Kerja 16. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
			Tingkat Pengeluaran Perkapita	Rp	Pengeluaran per kapita disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli. Rata-rata pengeluaran per kapita setahun diperoleh dari Susenas Modul, dihitung dari level provinsi hingga level kab/kota. Rata-rata pengeluaran per kapita dibuat konstan/riil dengan tahun dasar 2012=100. (sesuai Rilis BPS)	Bappeda	
			Produksi perikanan tangkap	Kg	Jumlah produksi perikanan tangkap dalam satu tahun	Disperik	1. pengembangan perikanan tangkap 2. Program pengembangan budidaya perikanan
			Produksi perikanan budidaya	Kg	Jumlah produksi perikanan budidaya dalam satu tahun	Disperik	3. Program penyediaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana produksi perikanan budidaya 4. Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar
		Meningkatnya kualitas serta produktivitas koperasi dan UMKM	Persentase koperasi sehat	%	$\frac{\text{Jumlah koperasi Aktif}}{\text{Jumlah koperasi}} \times 100\%$	Diskoperindag	1. Program penciptaan iklim UKM yang kondusif 2. Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM
			Persentase pertumbuhan IKM	%	$\frac{\text{Jml IKM tahun } n - \text{jml IKM tahun } (n - 1)}{\text{Jml IKM tahun } (n - 1)} \times 100$	Diskoperindag	3. Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		PROGRAM
					FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	Persentase pertumbuhan kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	$\frac{\text{PDRB Sektor Perdagangan}}{\text{PDRB}}$	Diskoperindag	4. Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM
		Meningkatnya kunjungan wisatawan	Peningkatan wisatawan	%	$\frac{\text{Jumlah wisatawan tahun } n}{\text{Jumlah wisatawan tahun } (n - 1)} \times 100\%$	Disparpora	1. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 2. Program pengembangan destinasi pariwisata 3. Program pengembangan kemitraan pariwisata
8.	Meningkatkan kualitas tenaga kerja guna mengurangi pengangguran	Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	$\frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$	Disnaker	1. Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja 2. Program peningkatan kesempatan kerja 3. Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan
9.	Menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Pemalang	Menurunnya penduduk miskin	Persentase penduduk miskin	%	$\frac{\text{Jumlah penduduk miskin}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100\%$	Bappeda	1. Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial

Misi 4: Meningkatkan sarana prasarana dasar serta memperkuat sentra-sentra produksi berbasis kewilayahan sesuai dengan karakteristik dan potensi wilayah

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		PROGRAM
					FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	
1	2	3	4	5	6	7	8
10.	Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar dan penunjang secara merata.	Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar dan penunjang secara merata.	Persentase jalan dalam kondisi baik	%	$\frac{\text{Jalan dalam kondisi baik}}{\text{panjang jalan secara keseluruhan}} \times 100\%$	DPU TR	1. Program pembangunan jalan dan jembatan 2. Program tanggap darurat jalan dan jembatan 3. Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 4. Program inspeksi kondisi jalan dan jembatan 5. Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan 6. Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh 7. Program rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase/ gorong-gorong 8. Program pembangunan turap/talud/bronjong 9. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya 10. Program penyediaan dan pengolahan air baku 11. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah 12. Program pengaturan jasa konstruksi 13. Program pemanfaatan ruang 14. Program pengendalian pemanfaatan ruang 15. Program pengembangan pengelolaan, dan konservasi sungai, danau, dan sumber daya air lainnya 16. Program peningkatan kualitas infrastruktur kewilayahan
			Persentase jembatan dalam kondisi baik	%	$\frac{\text{Jembatan dalam kondisi baik}}{\text{Jumlah jembatan secara keseluruhan}} \times 100\%$	DPU TR	
			Persentase saluran irigasi dalam kondisi baik	%	$\frac{\text{Irigasi dalam kondisi baik}}{\text{panjang irigasi secara keseluruhan}} \times 100\%$	DPU TR	
			Cakupan rumah tangga yang mendapatkan pelayanan air minum	%	$\frac{\text{Jumlah masyarakat yang terlayani}}{\text{proyeksi total masyarakat}} \times 100\%$	DPU TR	
			Persentase saluran drainase dalam kondisi baik	%	$\frac{\text{Panjang drainase terseumbat (dalam km)}}{\text{Panjang seluruh drainase di wilayah perkotaan}} \times 100\%$	DPU TR	
			Persentase RTLH	%	$\frac{\text{Jumlah rumah tidak layak huni tertangani}}{\text{Jumlah rumah tidak layak huni}} \times 100\%$	Disperkim	

f

Misi 5: Mewujudkan kehidupan masyarakat yang agamis, toleran, harmonis, dan saling menghormati

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		PROGRAM
					FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	
1	2	3	4	5	6	7	8
13.	Meningkatkan toleransi dan hubungan beragama yang harmonis dan saling menghormati dalam kehidupan masyarakat	Terciptanya kehidupan beragama yang rukun dan damai	Persentase penurunan konflik sosial	%	$\frac{\text{Jumlah konflik sosial tahun } n}{\text{Jumlah konflik sosial tahun } (n - 1)} \times 100\%$	Satpol PP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 2. Program Pendidikan Politik Masyarakat 3. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Misi 6: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, penegakan supremasi hukum serta kemudahan investasi dan daya saing daerah

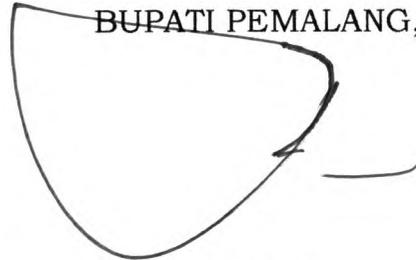
No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		PROGRAM
					FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	
1	2	3	4	5	6	7	8
14	Meningkatkan realisasi investasi yang didukung iklim investasi yang kondusif	Meningkatnya nilai realisasi investasi	Nilai investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	Rp	Jumlah Realisasi Investasi	Dinas PMPTSP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi 2. Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi 3. Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah 4. Program penanganan pengaduan di bidang investasi dan perijinan

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		PROGRAM
					FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	
1	2	3	4	5	6	7	8
15.	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagai wujud pelayanan publik yang prima dan perbaikan citra publik	Meningkatnya kapasitas Aparatur dalam meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	Hasil Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah	Nilai	Nilai Hasil Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah	BPKAD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 2. Program Peningkatan Kualitas Sumberdaya Aparatur 3. Program Pembinaan dan Pengembangan Apatur
		Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Rata-rata Skor Survey Kepuasan Masyarakat pada PD Pelayanan Publik	Skor	$\frac{\text{Jumlah Skor SKM seluruh Yanblik}}{\text{Jumlah Yanblik}}$	Setda	
17.	Meningkatkan kualitas jaringan telekomunikasi dan informasi guna menunjang pelayanan publik	Meningkatnya kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi	Cakupan pelayanan TI bagi masyarakat	Titik Hotspot	Jumlah Titik Hotspot yang terbangun	Diskominfo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa 2. Program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi 3. Program penguatan kelembagaan dalam pengelolaan komunikasi dan informasi daerah 4. Program peningkatan tata laksana komunikasi dan informasi 5. Program kerjasama informasi dan media massa

Misi 7: Menumbuhkan kembali budaya asli daerah sebagai landasan pembentukan jati diri dan kepribadian masyarakat

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		PROGRAM
					FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	
1	2	3	4	5	6	7	8
18.	Menumbuhkembangkan Budaya Asli Kabupaten Pemalang sebagai kekayaan non ragawi dan Jati Diri Pemalang	Meningkatnya kelestarian nilai-nilai Budaya, Seni, dan kekayaan budaya Asli Pemalang	Cakupan kelompok seni yang dibina	%	$\frac{\text{Jumlah kelompok kesenian yang dibina}}{\text{jumlah kelompok kesenian secara keseluruhan}} \times 100\%$	Dindikbud	1. Program pengembangan nilai budaya 2. Program pengelolaan kekayaan budaya 3. Program pengelolaan keragaman budaya 4. Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya
			Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	%	$\frac{\text{Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan}}{\text{jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dimiliki oleh daerah}} \times 100\%$	Dindikbud	

Paraf Hirarkhi	
Kasubbag	
Kabag	
Asisten	
Sekda	

BUPATI PEMALANG,

 JUNAEDI

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR /TAHUN 2017

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 26 TAHUN 2016 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2016 – 2021

**INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
TAHUN 2016 – 2021**

A. SEKRETARIAT DAERAH

NO.	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB (BIDANG)
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya perkembangan perekonomian, usaha daerah dan sektor informal yang lebih produktif dan kompetitif melalui kerjasama dan iklim investasi yang baik	Persentase meningkatnya perkembangan laba Perusda	%	$\frac{\text{Laba tahun } n - \text{laba tahun } n - 1}{\text{laba tahun } n - 1} \times 100$	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
2.	Meningkatnya kualitas pemerintahan daerah	Banyaknya kecamatan yang penyelenggaraan PATEN	Kec	$\frac{\text{Jumlah Kecamatan PATEN}}{\text{Jumlah seluruh kecamatan}}$	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
		Nilai LPPD	Nilai	Nilai LPPD	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
3.	Terwujudnya peningkatan pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Persentase kegiatan keprotokolanan KDH/WKDH yang terfasilitasi	%	$\frac{\text{Jumlah kegiatan KDH WKDN yang terfasilitasi dalam keg 1 b}}{\text{Pengelola jaringan dokumentasi informasi hukum dan perpustakaan}}$	BAGIAN UMUM

1 ✓ Vanu

NO.	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB (BIDANG)
1	2	3	4	5	6
4.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	Nilai evaluasi AKIP Setda	Nilai	Nilai LkjIP Setda	SEMUA BAGIAN PADA SETDA
		Nilai evaluasi LkjIP Pemda komponen pelaporan kinerja	Nilai	Nilai LkjIP Pemda komponen pelaporan kinerja	BAGIAN PP & RB
5.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Rata-rata skor survey kepuasan masyarakat pada PD pelayanan publik	skor	Rata-rata skor survey kepuasan masyarakat pada PD pelayanan publik	BAGIAN PP & RB
		Persentase PD pelayanan publik yang memenuhi standar pelayanan	%	$\frac{\text{Jumlah PD pelayanan publik yang tersertifikasi}}{\text{Jumlah seluruh PD pelayanan publik}} \times 100\%$	BAGIAN PP & RB
6.	Meningkatnya kualitas organisasi dan ketatalaksanaan pemerintah daerah	Tertatanya organisasi perangkat daerah sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah	Belum / sudah	Sudah/belum tertatanya organisasi perangkat daerah sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah	BAGIAN ORGANISASI
7.	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan kerukunan hidup antar umat beragama	Persentase kebijakan Pemerintah Daerah bidang social, kegamaan dan penanggulangan kemiskinan yang dimonitor dan dievaluasi	%	$\frac{\text{Jumlah kebijakan bidang sosial, keagamaan dan penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan}}{\text{Jumlah seluruh kebijakan bidang sosial, keagamaan dan penanggulangan kemiskinan}} \times 100\%$	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
8.	Meningkatnya pengendalian pembangunan daerah	Persentase kegiatan/paket pengadaan yang dimonitoring dan dievaluasi		$\frac{\text{Jumlah kegiatan/paket pengadaan yang dimonitoring dan dievaluasi}}{\text{Jumlah kegiatan/paket pengadaan yang ada}} \times 100\%$	
9.	Terwujudnya harmonisasi dan sinkronisasi rancangan produk hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintah daerah	Persentase usulan Raperda yang menjadi Perda	%	$\frac{\text{Jumlah usulan Raperda yang ditetapkan menjadi Perda}}{\text{Jumlah usulan Raperda yang masuk}} \times 100\%$	BAGIAN HUKUM

B. SEKRETARIAT DPRD

NO.	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB (BIDANG)
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dan pelaporan kinerja pemerintah daerah	Nilai LkjIP	Nilai	Nilai LkjIP yang diperoleh	SEMUA BAGIAN PADA SEKRETARIAT DPRD
2.	Dilaksanakannya pembahasan produk-produk hukum sesuai aspirasi masyarakat dan ketentuan peraturan perundang-undangan	Perda yang ditetapkan	Buah	Jumlah Perda yang ditetapkan	BAGIAN PERSIDANGAN
		Raperda yang disetujui DPRD	%	$\frac{\text{Jumlah Raperda yang disetujui DPRD}}{\text{Jumlah Raperda yang diusulkan}} \times 100\%$	BAGIAN PERSIDANGAN
		Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti	%	$\frac{\text{Jumlah keputusan DPRD yang ditindaklanjuti oleh DPRD}}{\text{Jumlah keputusan DPRD yang dihasilkan}} \times 100\%$	BAGIAN PERSIDANGAN

C. INSPEKTORAT

NO.	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB (BIDANG)
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dan pelaporan kinerja pemerintah daerah	Nilai LkjIP	Nilai	Nilai LkjIP yang diperoleh	INSPEKTORAT
2.	Terlaksananya pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan di Perangkat Daerah dan Desa	Persentase obyek pemeriksaan selama 1 tahun dibandingkan total obyek pemeriksaan (audit universe)	%	$\frac{\text{Jumlah obyek pemeriksaan yang diperiksa}}{\text{Total obyek pemeriksaan (audit universe)}} \times 100\%$	INSPEKTORAT
		Persentase obyek pemeriksaan yang memperoleh hasil evaluasi lebih baik dari pemeriksaan sebelumnya	%	$\frac{\text{Jumlah obyek pemeriksaan yang evaluasinya lebih baik dari pemeriksaan sebelumnya}}{\text{Jumlah obyek pemeriksaan dalam 1 tahun}} \times 100\%$	INSPEKTORAT

E. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

NO.	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB (BIDANG)
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dan pelaporan kinerja pemerintah daerah	Nilai LkjIP	Nilai	Nilai LKjIP yang diperoleh	BKD
2.	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	Persentase Aparatur Sipil Negara yang mengikuti diklat	%	$\frac{\text{Jumlah Aparatur Sipil Negara yang mengikuti Diklat}}{\text{Jumlah Aparatur Sipil Negara}} \times 100\%$	BIDANG PENGEMBANGAN APARATUR
3.	Terwujudnya sumber daya aparatur yang profesional melalui penataan atas dasar kebutuhan/kompetensi/sistem karier	Persentase ASN yang dilakukan penataan	%	$\frac{\text{Jumlah Aparatur Sipil Negara yang mutasi}}{\text{Jumlah ASN}} \times 100\%$	BIDANG MUTASI DAN PEMBINAAN
		Persentase Aparatur Sipil Negara yang mengikuti Assessment (uji kompetensi) sebagai bahan pertimbangan tim baperjakat	%	$\frac{\text{Jumlah Aparatur Sipil Negara yang mengikuti assesment}}{\text{Jumlah Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat jabatan}} \times 100\%$	BIDANG PENGEMBANGAN PEGAWAI
		Persentase pejabat yang ditempatkan sesuai hasil Assesment	%	$\frac{\text{jumlah jabatan sesuai assesment}}{\text{jumlah jabatan yang harus terisi}} \times 100\%$	BIDANG PENGEMBANGAN APARATUR BIDANG JABATAN DAN PENILAIAN KINERJA
4.	Terwujudnya layanan kepegawaian yang dapat dilakukan dengan cepat, tepat berbasis teknologi informasi dan komunikasi dengan dukungan database PNS yang akurat yang dapat dipakai sebagai bahan penyusunan kebijakan dibidang kepegawaian	Persentase pembangunan/pengembangan informasi kepegawaian berbasis teknologi informasi	%	$\frac{\text{Jumlah aplikasi yang dibangun atau dikembangkan tahun n}}{\text{Jumlah aplikasi yang dibangun atau dikembangkan 5n}} \times 100\%$	BIDANG JABATAN DAN PENILAIAN KINERJA

F. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

NO.	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB (BIDANG)
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dan pelaporan kinerja pemerintah daerah	Nilai LkjIP	Nilai	Nilai LkjIP yang diperoleh	SEMUA BIDANG DINPERMASDES
2.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	%	$\frac{\text{Jumlah swadaya masyarakat}}{\text{Jumlah program yang ada}} \times 100\%$	BIDANG PEMBERDAYAAN EKONOMI & SARANA PRASARANA DESA
		Persentase cakupan dokumen perencanaan pembangunan desa	%	$\frac{\text{Jumlah dokumen perencanaan pembangunan desa}}{\text{Jumlah seluruh desa}} \times 100\%$	BIDANG PEMBERDAYAAN EKONOMI & SARANA PRASARANA DESA
		Persentase terselenggaranya musyawarah dalam perencanaan pembangunan desa	%	$\frac{\text{Jumlah desa yg melaksanakan musrenbang}}{\text{Jumlah seluruh desa}} \times 100\%$	BIDANG PEMBERDAYAAN EKONOMI & SARANA PRASARANA DESA
		Persentase pembinaan penggunaan dana Alokasi Dana Desa (ADD)/Dana Desa (DD)	%	$\frac{\text{Jumlah desa yg mendapatkan pembinaan ADD/DD}}{\text{Jumlah seluruh desa}} \times 100\%$	BIDANG PEMBERDAYAAN PEMERINTAHAN DESA
3.	Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintahan desa	Persentase kepala desa yang telah mengikuti pelatihan	%	$\frac{\text{Jumlah kepala desa yg mengikuti pelatihan}}{\text{Jumlah seluruh Desa}} \times 100\%$	BIDANG PEMBERDAYAAN PEMERINTAHAN DESA
		Persentase Perangkat Desa yang telah mengikuti pelatihan	%	$\frac{\text{Jumlah perangkat desa yg mengikuti pelatihan}}{\text{Jumlah seluruh Desa}} \times 100\%$	BIDANG PEMBERDAYAAN PEMERINTAHAN DESA
		Persentase Pengurus / anggota BPD yang telah mendapatkan pelatihan.	%	$\frac{\text{Jumlah pengurus/anggota BPD mendapatkan pelatihan}}{\text{Jumlah seluruh Desa}} \times 100\%$	BIDANG PEMBERDAYAAN PEMERINTAHAN DESA
		Jumlah desa yang mendapatkan pemeriksaan akhir masa jabatan (AMJ)	%	$\frac{\text{Jumlah desa yg mendapatkan pemeriksaan AMJ}}{\text{Jumlah seluruh Desa}} \times 100\%$	BIDANG PEMBERDAYAAN PEMERINTAHAN DESA
		Persentase cakupan penyediaan dokumen AMJ (Akhir Masa Jabatan) Kepala Desa	%	$\frac{\text{Jumlah dokumen LPPD AMJ Kades yang disusun}}{\text{Jumlah Kades yang AMJ}} \times 100\%$	BIDANG PEMBERDAYAAN PEMERINTAHAN DESA
		Persentase pembinaan dan fasilitasi pengelolaan kekayaan/aset desa	%	$\frac{\text{Jumlah desa yg dibina aset/kekayaan desa}}{\text{Jumlah seluruh Desa}} \times 100\%$	BIDANG PEMBERDAYAAN PEMERINTAHAN DESA

NO.	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB (BIDANG)
1	2	3	4	5	6
		Persentase desa yang mendapatkan pembinaan administrasi desa	%	$\frac{\text{Jumlah desa yg mendapatkan pembinaan administrasi}}{\text{Jumlah seluruh Desa}} \times 100\%$	BIDANG PEMBERDAYAAN PEMERINTAHAN DESA
		Terfasilitasinya penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa	%	Jumlah desa yang terfasilitasi penyelenggaraan PILKADES	BIDANG PEMBERDAYAAN PEMERINTAHAN DESA
4.	Meningkatnya fungsi lembaga kemasyarakatan desa dalam pembangunan desa	Persentase desa dalam pengelolaan penatausahaan dan penyelenggaraan pemerintahan desa berbasis pemberdayaan informasi dan teknologi	%	$\frac{\text{Jumlah desa berbasis IT}}{\text{Jumlah seluruh Desa}} \times 100\%$	BIDANG PEMBERDAYAAN EKONOMI & SARANA PRASARANA DESA
		Persentase Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) yang telah mengikuti pelatihan	%	$\frac{\text{Jumlah Kader KPM yang mengikuti pelatihan}}{\text{Jumlah seluruh Kader KPD yang ada}} \times 100\%$	
		Posyandu aktif	Unit	Jumlah posyandu strata pratama meningkat menjadi strata diatasnya	
5.	Meningkatnya peran dan fungsi lembaga ekonomi desa	Cakupan bina pasar desa	%	$\frac{\text{Jumlah pasar desa yg dibina}}{\text{Jumlah seluruh pasar desa}} \times 100\%$	BIDANG PEMBERDAYAAN EKONOMI & SARANA PRASARANA DESA
		Cakupan bina UED-SP	%	$\frac{\text{Jumlah UED - SP yg dibina}}{\text{Jumlah seluruh UED - SP}} \times 100\%$	BIDANG PEMBERDAYAAN EKONOMI & SARANA PRASARANA DESA
		Jumlah BUMDes yang dibentuk	Unit	Menunjukkan jumlah BUMDes yang dibentuk	BIDANG PEMBERDAYAAN EKONOMI & SARANA PRASARANA DESA
		Cakupan bina BUMDes	%	$\frac{\text{Jumlah BUMDes yg dibina}}{\text{Jumlah seluruh BUMDes}} \times 100\%$	BIDANG PEMBERDAYAAN EKONOMI & SARANA PRASARANA DESA
		Jumlah BUMDes yang difasilitasi manajemen pengelolannya	%	$\frac{\text{Jumlah BUMDes yg difasilitasi manajemen}}{\text{Jumlah seluruh BUMDes}} \times 100\%$	BIDANG PEMBERDAYAAN EKONOMI & SARANA PRASARANA DESA
		Cakupan bina Cadangan Pangan Pemerintah Desa/CPPD	%	$\frac{\text{Jumlah CPPD yg dibina}}{\text{Jumlah seluruh CPPD}} \times 100\%$	BIDANG PEMBERDAYAAN EKONOMI & SARANA PRASARANA DESA

NO.	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB (BIDANG)
1	2	3	4	5	6
		Cakupan bina UP2K	%	$\frac{\text{Jumlah UP2K yg dibina}}{\text{Jumlah seluruh UP2K}} \times 100\%$	BIDANG PEMBERDAYAAN EKONOMI & SARANA PRASARANA DESA
		Cakupan Bina kelompok TTG	%	$\frac{\text{Jumlah kelompok TTG yg dibina}}{\text{Jumlah seluruh kelompok TTG}} \times 100\%$	BIDANG PEMBERDAYAAN EKONOMI & SARANA PRASARANA DESA

G. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO.	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB (BIDANG)
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dan pelaporan kinerja pemerintah daerah	Nilai LkjIP	Nilai	Nilai LKjIP yang diperoleh	DINDIKPORA
2.	Lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu dimasa yang akan datang (HLS dihitung pada usia 7 tahun ke atas)	Harapan Lama Sekolah (HLS), (BPS)	%	$HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$	DINDIKPORA
3.	Ketersediaan layanan pendidikan TK/RA,SD/MI SMP/MTs/ SMA/MA dan SMK merata di setiap kecamatan	APK Jenjang - PAUD - SD/MI - SMP/MTs - SMA/MA dan SMK	%	$\frac{\text{Jumlah penduduk yang sekolah di PAUD}}{\text{Jumlah penduduk umur 4-6 tahun}} \times 100\%$ $\frac{\text{Jumlah penduduk yang sekolah di SD}}{\text{Jumlah penduduk umur 7-12 tahun}} \times 100\%$ $\frac{\text{Jumlah penduduk yang sekolah di SLTP}}{\text{Jumlah penduduk umur 13-15 tahun}} \times 100\%$	BIDANG TK/SD, BIDANG PNFI DAN BIDANG SLTP/SLTA

NO.	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB (BIDANG)
1	2	3	4	5	6
				$\frac{\text{Jumlah penduduk yang sekolah di SLTA}}{\text{Jumlah penduduk umur 16-18 tahun}} \times 100\%$	
		Angka Putus Sekolah - SD/MI - SMP/MTs - SMA/MA dan SMK	%	$\frac{\text{Jumlah Siswa Putus SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK}}{\text{Jumlah Siswa pada tingkat yang sama pada tahun ajaran sebelumnya}} \times 100\%$	BIDANG TK/SD DAN BIDANG SLTP/SLTA
		Rata-rata Lama Sekolah (BPS)		Kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki. dan pendidikan yang ditamatkan	DINDIKPORA KAB. PEMALANG
		Angka Melek Huruf	%	$\frac{\text{Jumlah Penduduk Yang Bisa membaca dan menulis}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100\%$	BIDANG PNFI
4.	Ketersediaan sarana fisik bangunan, guru, sarana pendukung dan alat pendidikan	Ruang kelas dalam keadaan baik - SD/MI - SMP/MTs - SMA/MA dan SMK	%	$\frac{\text{Jumlah Sekolah SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK Kondisi Bangunan Baik}}{\text{Jumlah Sekolah SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK}} \times 100\%$	BIDANG TK/SD DAN BIDANG SLTP/SLTA
		Angka Kelulusan - SD/MI - SMP/MTs - SMA/MA dan SMK	%	$\frac{\text{Jumlah Siswa tingkat Tertinggi pada jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK}}{\text{Jumlah Siswa tingkat Tertinggi pada jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK pada tahun sebelumnya}} \times 100\%$	BIDANG TK/SD DAN BIDANG SLTP/SLTA
		Rata-rata Nilai UN/UAS-BN - SD/MI - SMP/MTs - SMA/MA dan SMK	Nilai	$\frac{\text{Total Nilai Keseluruhan Ujian}}{\text{Jumlah Mapel yang di Ujikan}}$	SELURUH BIDANG PADA DINDIKPORA
5.	Manajemen dan Tata Kelola pada satuan pendidikan, guru, dan sarana pendukung pendidikan	Guru Layak Mengajar - PAUD - SD/MI - SMP/MTs - SMA/MA dan SMK	%	$\frac{\text{Jumlah guru berijazah kualifikasi S1/D4}}{\text{Jumlah guru SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK}} \times 100\%$	BIDANG TENDIK

NO.	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB (BIDANG)
1	2	3	4	5	6
		Ketersediaan Perpustakaan - SD/MI - SMP/MTs - SMA/MA dan SMK	Unit	Jumlah Perpustakaan SD/MI, SMP/MTs, SMK/MA dan SMK di Kabupaten Pemalang	BIDANG TK/SD DAN BIDANG SLTP/SLTA
		Ketersediaan Lab. IPA - SMP/MTs - SMA/MA dan SMK	Unit	Jumlah Laboratorium IPA SMP/MTs, SMK/MA dan SMK di Kabupaten Pemalang	BIDANG SLTP/SLTA
		Angka Partisipasi Murni - SD/MI - SMP/MTs - SMA/MA dan SMK	%	$\frac{\text{Jumlah penduduk umur 7-12 yang sekolah di SD}}{\text{Jumlah penduduk umur 7-12 tahun}} \times 100\%$ $\frac{\text{Jumlah penduduk umur 13-15 yang sekolah di SLTP}}{\text{Jumlah penduduk umur 13-15 tahun}} \times 100\%$ $\frac{\text{Jumlah penduduk umur 16-18 yang sekolah di SLTA}}{\text{Jumlah penduduk umur 16-18 tahun}} \times 100\%$	BIDANG TK/SD DAN BIDANG SLTP/SLTA
6.	Meningkatnya kelestarian nilai - nilai Budaya, seni dan kekayaan budaya asli Pemalang	Cakupan kelompok seni yang aktif	%	$\frac{\text{Jumlah kelompok seni yang aktif}}{\text{Total jumlah kelompok seni}} \times 100 \%$	BIDANG KEBUDAYAAN
		Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang di lestarikan	%	$\frac{\text{Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan}}{\text{Total jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya}} \times 100 \%$	BIDANG KEBUDAYAAN

H. DINAS KESEHATAN

NO.	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB (BIDANG)
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dan pelaporan kinerja pemerintah daerah	Nilai LkjIP	Nilai	Nilai LKjIP yang diperoleh	DINAS KESEHATAN

NO.	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB (BIDANG)
1	2	3	4	5	6
2.	Menurunnya AKI, AKB, AKABA dan Balita Gizi Buruk	Angka Kematian Ibu (AKI)	Per 100.000 KH	$\frac{\text{Jumlah Kematian Ibu}}{\text{Jumlah Kelahiran Hidup}} \times 100.000$	DINAS KESEHATAN
		Angka Kematian Bayi (AKB)	Per 1.000 KH	$\frac{\text{Jumlah Kematian Bayi}}{\text{Jumlah Kelahiran Hidup}} \times 1.000$	DINAS KESEHATAN
		Angka Keematan Balita (AKABA)	Per 1.000 KH	$\frac{\text{Jumlah Kematian Balita}}{\text{Jumlah Kelahiran Hidup}} \times 1.000$	DINAS KESEHATAN
		Persentase Balita Gizi Buruk	%	$\frac{\text{Jumlah Balita Gizi Buruk}}{\text{Jumlah Balita}} \times 100 \%$	DINAS KESEHATAN

I. DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO.	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB (BIDANG)
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dan pelaporan kinerja pemerintah daerah	Nilai LkjIP	Nilai	Nilai LkjIP	DINSOSNAKERTRANS
2.	Meningkatnya PMKS yang memperoleh bantuan melalui pelayanan sosial, rehabilitasi sosial, kesejahteraan sosial dan pemberdayaan sosial	Persentase (%) PMKS yang meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasar	%	$\frac{\text{Jumlah PMKS yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar}}{\text{Jumlah seluruh PMKS}} \times 100$	BIDANG SOSIAL
3.	Meningkatnya sarana prasarana panti sosial yang mendapat bantuan	Persentase (%) Panti sosial skala Kabupaten/Kota yang menyediakan sarana prasarana sosial	%	$\frac{\text{Jumlah panti sosial skala kabupaten yang menyediakan sarana dan prasarana sosial}}{\text{Jumlah seluruh panti sosial}} \times 100$	BIDANG SOSIAL
4.	Meningkatnya pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) dalam pelayanan kesejahteraan sosial	Persentase (%) PSKS yang meningkat kapasitasnya	%	$\frac{\text{Jumlah SDM kesejahteraan sosial dan lembaga kesejahteraan sosial}}{\text{Jumlah seluruh panti sosial}} \times 100$	BIDANG SOSIAL
5.	Meningkatnya kepedulian masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan kesejahteraan sosial	Persentase PMKS yang tertangani	%	$\frac{\text{Jumlah PMKS yang mendapatkan penanganan sosial}}{\text{Jumlah seluruh PMKS}} \times 100$	BIDANG SOSIAL
6.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam ber-KB	Rata-rata jumlah anak per keluarga (orang)	Orang	$\frac{\text{Jumlah anak}}{\text{Jumlah keluarga}}$	BIDANG KELUARGA BERENCANA
		Rasio akseptor KB	%	$\frac{\text{Jumlah cakupan Peserta KB Aktif}}{\text{Jumlah Pasangan Usia Subur}} \times 100\%$	BIDANG KELUARGA BERENCANA
		Cakupan peserta KB aktif (%)	%	$\frac{\text{Jumlah peserta program KB aktif}}{\text{Jumlah Pasangan Usia Subur}} \times 100\%$	BIDANG KELUARGA BERENCANA
		Unmetneed	%	$\frac{\text{Jumlah PUS (tak berKB), ingin anak ditunda/ tak ingin anak lagi dan tidak menggunakan alkon}}{\text{Jumlah PUS (15 - 45 th)}} \times 100\%$	BIDANG KELUARGA BERENCANA

NO.	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB (BIDANG)
1	2	3	4	5	6
		Angka drop out KB	%	$\frac{\text{Jumlah peserta KB yg keluar dari program KB}}{\text{Jumlah seluruh peserta KB}} \times 100\%$	BIDANG KELUARGA BERENCANA
		Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	%	Upaya penyediaan kebutuhan alat dan obat kontrasepsi dengan pengadaan sejumlah 30% oleh Pemerintahan Daerah	BIDANG KELUARGA BERENCANA
		Angka pemakaian kontrasepsi / CPRk bagi perempuan menikah (usia 15-49) semua cara dan cara modern	%	$\frac{\text{Jumlah PUS memakai satu cara KBk}}{\text{Jumlah Pasangan Usia Subur}} \times 100\%$	BIDANG KELUARGA BERENCANA
		Persentase keluarga pra sejahtera/sejahtera 1 (%)	%	$\frac{\text{Jumlah Keluarga pra sejahtera dan sejahtera 1}}{\text{Jumlah Keluarga}} \times 100\%$	BIDANG KELUARGA BERENCANA
		Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) dengan istri usia dibawah 20 tahun (%)	%	$\frac{\text{Jumlah PUS yang istrinya di bawah usia 20 tahun}}{\text{Jumlah PUS}} \times 100\%$	BIDANG KELUARGA BERENCANA
		Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19 tahun) per 1000 perempuan usia 15-19 tahun		$\frac{\text{Jumlah kelahiran remaja (perempuan usia 15 – 19 tahun)}}{\text{jumlah penduduk perempuan usia 15 – 19 tahun}} \times 100\%$	BIDANG KELUARGA BERENCANA
		Prosentase peserta KB mandiri yang tergabung dalam UPPKS (%)	%	$\frac{\text{Jumlah peserta aktif yg tergabung dlm UPPKS}}{\text{Jumlah peserta KB aktif}} \times 100\%$	BIDANG KELUARGA BERENCANA
		Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap Desa/Kelurahan	(%)	$\frac{\text{Rekap data mikro keluarga desa/kelurahan}}{\text{Jumlah desa/kelurahan}} \times 100\%$	BIDANG KELUARGA BERENCANA
		Rasio PLKB dengan desa/kelurahan (orang)	Orang	$\frac{\text{Jumlah desa/kelurahan}}{\text{PLKB/PKB}}$	BIDANG KELUARGA BERENCANA
		Rasio Pembantu Pembina KB Desa	%	$\frac{\text{Jumlah PPKBD}}{\text{Jumlah lokasi binaan PPKBD}} \times 100\%$	BIDANG KELUARGA BERENCANA
		Cakupan PUS peserta KB anggota UPPKS	%	$\frac{\text{Jumlah PUS peserta KB}}{\text{Jumlah anggota UPPKS}} \times 100\%$	BIDANG KELUARGA BERENCANA

NO.	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB (BIDANG)
1	2	3	4	5	6
		Cakupan anggota bina keluarga balita ber KB	%	$\frac{\text{Jumlah anggota bina keluarga balita berKB}}{\text{Jumlah seluruh PUS}} \times 100\%$	BIDANG KELUARGA BERENCANA
		Prosentase kecamatan memiliki fasilitas pelayanan konseling remaja aktif	%	$\frac{\text{Jumlah kecamatan memiliki fasilitas layanan konseling remaja aktif}}{\text{Jumlah kecamatan}} \times 100\%$	BIDANG KELUARGA BERENCANA
7.	Meningkatnya kualitas hidup dan partisipasi perempuan dalam ranah publik	Prosentase kelembagaan PUG yang aktif	%	$\frac{\text{Jumlah lembaga PUG (pokja PUG, focalpoint, P2TP2A, PPT) aktif}}{\text{Jumlah seluruh lembaga PUG}} \times 100\%$	BIDANG PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN, PEREMPUAN DAN SOSIAL BUDAYA
		Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	$\frac{\text{Pekerja perempuan di lembaga pemerintah}}{\text{Jumlah pekerja perempuan}} \times 100\%$	BIDANG PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN, PEREMPUAN DAN SOSIAL BUDAYA
		Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengadilan	%	$\frac{\text{Jumlah korban kekerasan yg ditangani}}{\text{Jumlah seluruh korban kekerasan}} \times 100\%$	BIDANG PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN, PEREMPUAN DAN SOSIAL BUDAYA
		Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	%	$\frac{\text{Jumlah korban kekerasan yg ditangani rohani}}{\text{Jumlah seluruh korban kekerasan}} \times 100\%$	BIDANG PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN, PEREMPUAN DAN SOSIAL BUDAYA
		Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.	%	$\frac{\text{Jumlah penegakan hukum s. d. putusan pengadilan}}{\text{Jumlah seluruh korban kekerasan}} \times 100\%$	BIDANG PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN, PEREMPUAN DAN SOSIAL BUDAYA
		Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum.	%	$\frac{\text{Jumlah layanan bantuan hukum korban kekerasan}}{\text{Jumlah seluruh korban kekerasan}} \times 100\%$	BIDANG PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN, PEREMPUAN DAN SOSIAL BUDAYA
		Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	$\frac{\text{Jumlah layanan pemulangan korban kekerasan}}{\text{Jumlah seluruh korban kekerasan}} \times 100\%$	BIDANG PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN, PEREMPUAN DAN SOSIAL BUDAYA

NO.	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB (BIDANG)
1	2	3	4	5	6
		Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	$\frac{\text{Jumlah layanan reintegrasi sosial korban kekerasan}}{\text{Jumlah seluruh korban kekerasan}} \times 100\%$	BIDANG PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN, PEREMPUAN DAN SOSIAL BUDAYA
		Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	%	$\frac{\text{Jumlah layanan rehabilitasi sosial oleh tenaga terlatih terhadap korban kekerasan}}{\text{Jumlah seluruh korban kekerasan}} \times 100\%$	BIDANG PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN, PEREMPUAN DAN SOSIAL BUDAYA
		Rasio KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) (%)	%	$\frac{\text{Jumlah kasus KDRT}}{\text{Jumlah rumah tangga}} \times 100\%$	BIDANG PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN, PEREMPUAN DAN SOSIAL BUDAYA

J. DINAS TENAGA KERJA

NO.	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB (BIDANG)
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dan pelaporan kinerja pemerintah daerah	Nilai LkjIP	Nilai	Nilai LkjIP	DINSOSNAKERTRANS
2.	Meningkatnya jumlah pencari kerja yang mendapat pelatihan kerja	Persentase pencari kerja yang mendapatkan pelatihan kerja	%	$\frac{\text{Jumlah pencari kerja yang mendapat pelatihan kerja}}{\text{Jumlah pencari kerja yang mendaftar pelatihan kerja}} \times 100$	BIDANG PENEMPATAN TENAGA KERJA
3.	Meningkatnya akreditasi dan perijinan lembaga pelatihan kerja	Jumlah LPK milik pemerintah, perusahaan dan milik swasta yang mendapatkan pembinaan	%	$\frac{\text{Jumlah semua LPK milik pemerintah, perusahaan dan milik swasta yang mendapatkan pembinaan}}{\text{Jumlah seluruh LPK}} \times 100$	BIDANG PENEMPATAN TENAGA KERJA
4.	Meningkatnya penempatan tenaga kerja di dalam dan di luar negeri	Persentase jumlah pencari kerja yang ditempatkan dibandingkan jumlah pencari kerja	%	$\frac{\text{Jumlah pencari kerja yang ditempatkan}}{\text{Jumlah pencari kerja}} \times 100$	BIDANG PENEMPATAN TENAGA KERJA
5.	Meningkatkan hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja	Angka perselisihan yang terfasilitasi dan terselesaikan	%	$\frac{\text{Jumlah perselisihan yang terfasilitasi dan terselesaikan}}{\text{Jumlah perselisihan hubungan industrial}} \times 100$	BIDANG PENEMPATAN TENAGA KERJA

NO.	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB (BIDANG)
1	2	3	4	5	6
		Jumlah pekerja/buruh yang menjadi peserta program BPJS ketenagakerjaan	%	$\frac{\text{Jumlah pekerja/buruh peserta BPJS}}{\text{Jumlah tenaga kerja}} \times 100\%$	BIDANG PENEMPATAN TENAGA KERJA
6.	Meningkatnya kuantitas, kualitas Program Transmigrasi	Tercapainya jumlah penempatan transmigrasi (KK)	%	$\frac{\text{Jumlah calon transmigrasi yang diberangkatkan ke daerah transmigrasi}}{\text{Jumlah transmigrasi yang mendaftar}} \times 100\%$	BIDANG TRANSMIGRASI

K. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO.	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB (BIDANG)
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dan pelaporan kinerja pemerintah daerah	Nilai LkjIP	Nilai	Nilai LkjIP	DISDUKCATPIL
2.	Meningkatnya cakupan kepemilikan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.	Persentase penduduk ber-KTP persatuan penduduk	%	$\frac{\text{Jumlah penduduk usia 17 tahun keatas yang ber KTP}}{\text{Jumlah penduduk usia 17 tahun keatas atau telah menikah}} \times 100\%$	DISDUKCATPIL
		Persentase anak berakte kelahiran	%	$\frac{\text{Jumlah anak (usia 0 – 18 tahun) yang memiliki akte kelahiran}}{\text{Jumlah penduduk (0 – 18)}} \times 100\%$	DISDUKCATPIL
		Persentase kepemilikan akte kelahiran	%	$\frac{\text{Jumlah penduduk yang memiliki akta kelahiran}}{\text{Jumlah penduduk (usia 0 – 18 tahun)}} \times 100\%$	DISDUKCATPIL
		Presentase pasangan berakta nikah	%	$\frac{\text{Jumlah pasangan nikah berakta nikah}}{\text{Jumlah keseluruhan pasangan yang telah menikah}} \times 100\%$	DISDUKCATPIL

L. DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO.	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB (BIDANG)
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dan pelaporan kinerja pemerintah daerah	Nilai LkjIP	Nilai	Nilai LkjIP	DISKOPERINDAG

NO.	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB (BIDANG)
1	2	3	4	5	6
2.	Meningkatnya peran dan kualitas koperasi dan UMKM	Persentase koperasi sehat	%	$\frac{\text{Jumlah KSP dan USP sehat di Kab Pemalang tahun } n}{\text{Jumlah KSP dan USP yang dinilai tahun } n} \times 100 \%$	BIDANG KOPERASI
3.	Meningkatnya peran dan kualitas koperasi dan UMKM	Persentase koperasi aktif	%	$\frac{\text{Jumlah Koperasi Aktif Tahun } n}{\text{Jumlah seluruh koperasi}} \times 100 \%$	BIDANG KOPERASI
4.	Meningkatnya jumlah dan daya saing UMKM dalam pengembangan ekonomi daerah	Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Unit Usaha	Jumlah Unit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada tahun n	BIDANG KOPERASI
5.	Meningkatnya Pertumbuhan IKM yang berbahan baku lokal guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah	Persentase Pertumbuhan IKM	%	$\frac{\text{Jumlah IKM tahun } n - \text{Jumlah IKM tahun } n - 1}{\text{Jumlah IKM tahun } n - 1} \times 100 \%$	BIDANG PERINDUSTRIAN
6.	Meningkatnya kualitas dan daya saing IKM	Cakupan kelompok IKM yang dibina	%	$\frac{\text{Jumlah Kelompok IKM yang mendapat pembinaan Pemda}}{\text{Target Jumlah Kelompok IKM yang akan dibina selama 5 tahun}} \times 100 \%$	BIDANG PERINDUSTRIAN
7.	Meningkatnya daya saing produk IKM di pasar global	Jumlah IKM yang telah mengikuti promosi produk	Unit	Jumlah IKM yang mengikuti pameran promosi produk dalam 1 tahun	BIDANG PERINDUSTRIAN
8.	Meningkatnya peran usaha di sektor perdagangan dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi daerah.	Persentase pertumbuhan kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	$\frac{\text{Pertumbuhan PDRB tahun } n - \text{Pertumbuhan PDRB tahun } n - 1}{\text{Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan tahun } n - 1} \times 100 \%$	BIDANG PERDAGANGAN
9.	Meningkatnya peran usaha di sektor perdagangan dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi daerah.	Jumlah sidang tera ulang yang dilakukan	Lokasi	Jumlah lokasi sidang tera ulang yang dilakukan dalam tahun n	BIDANG PERDAGANGAN
10.	Meningkatnya peran usaha di sektor perdagangan dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi daerah.	Jumlah kelompok pedagang (formal dan informal) yang dibina	Kelompok	Jumlah kelompok pedagang yang dibina dalam tahun n	BIDANG PERDAGANGAN
11.	Meningkatnya kualitas pasar daerah melalui pembangunan, rehabilitasi dan revitalisasi pasar.	Meningkatnya jumlah pasar sehat	Unit	Jumlah pasar daerah yang memenuhi kriteria pasar sehat	BIDANG PASAR

M. DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO.	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB (BIDANG)
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dan pelaporan kinerja pemerintah daerah	Nilai LkjIP	Nilai	Nilai LKjIP yang diperoleh	DISBUDPAR
2.	Pembangunan potensi wisata, khususnya wisata alam	Peningkatan wisatawan	%	$\frac{\text{Jumlah wisatawan tahun } n - \text{Jumlah wisatawan tahun } n - 1}{\text{Jumlah wisatawan tahun } n - 1} \times 100 \%$	DISBUDPAR
3.	Kepemudaan, organisasi pemuda dan sarpras pendukung kegiatan pemuda	- Organisasi Pemuda yang dibina - Kegiatan Kepemudaan - Gelanggang/Balai Remaja (selain milik swasta)	Organisasi Kegiatan Gelanggang	Jumlah organisasi Pemuda Jumlah Kegiatan Kepemudaan Jumlah Gelanggang/Balai Remaja	BIDANG PEMBINAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
	Klub Olahraga dan Sarpras Olahraga	- Klub olahraga yang dibina - Gedung Olahraga - Lapangan Olahraga	Klub Gedung Lapangan	Jumlah klub olah raga per 10.000 penduduk Jumlah gedung olah raga per 10.000 penduduk Jumlah lapangan Olahraga per 10.000 penduduk	BIDANG PEMBINAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

N. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO.	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB (BIDANG)
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dan pelaporan kinerja pemerintah daerah	Nilai LkjIP	Nilai	Nilai LKjIP yang diperoleh	DPU
2.	Meningkatkan kualitas jalan dan jembatan	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	%	$\frac{\text{Jalan kabupaten dalam kondisi baik}}{\text{Jumlah panjang seluruh jalan kabupaten yang ada}} \times 100 \%$	BIDANG BINA MARGA
		Persentase jembatan rusak yang ditangani	%	$\frac{\text{Jembatan kabupaten rusak yg tertangani}}{\text{Jumlah seluruh jembatan kabupaten yang rusak}} \times 100 \%$	BIDANG BINA MARGA
		Persentase jembatan dalam kondisi baik	%	$\frac{\text{Jembatan kabupaten dalam kondisi baik}}{\text{Jumlah panjang seluruh jembatan kabupaten yang ada}} \times 100 \%$	BIDANG BINA MARGA
3.	Meningkatnya kualitas irigasi	Persentase irigasi dalam kondisi baik	%	$\frac{\text{Panjang saluran irigasi dalam kondisi baik}}{\text{Panjang saluran irigasi secara keseluruhan}} \times 100 \%$	BIDANG SDAME

NO.	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB (BIDANG)
1	2	3	4	5	6
4.	Meningkatnya pelayanan air bersih dan sanitasi	Persentase saluran drainase dalam kondisi baik	%	$\frac{\text{Panjang drainase tersumbat (km)}}{\text{Panjang seluruh drainase di wilayah perkotaan}} \times 100 \%$	BIDANG TARU DAN PRASWIL
		Ketersediaan pengelolaan air limbah rumah tangga	%	$\frac{\text{Jumlah rumah tidak layak huni tertangani}}{\text{Jumlah rumat tidak layak huni}} \times 100 \%$	BIDANG CIPTA KARYA
		Cakupan rumah tangga yang mendapatkan pelayanan air bersih perpipaan	%	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga menggunakan air bersih}}{\text{jumlah rumah tangga}} \times 100 \%$	

O. DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO.	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB (BIDANG)
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dan pelaporan kinerja pemerintah daerah	Nilai LkjIP	Nilai	Nilai LKjIP yang diperoleh	DINPERKIM
2.	Meningkatnya pelayanan air bersih dan sanitasi	Cakupan wilayah kumuh	%	$\frac{\text{Luas wilayah pemukiman kumuh yang tertangani}}{\text{Jumlah total luasan wilayah kumuh yang telah ditetapkan}} \times 100 \%$	BIDANG CIPTA KARYA
		Persentase RTLH	%	$\frac{\text{Jumlah rumah tidak layak huni tertangani}}{\text{Jumlah rumat tidak layak huni}} \times 100 \%$	BIDANG CIPTA KARYA

P. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO.	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB (BIDANG)
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dan pelaporan kinerja pemerintah daerah	Nilai LkjIP	Nilai	Nilai LKjIP yang diperoleh	DISHUBKOMINFO
2.	Terwujudnya pembangunan dan pemeliharaan sarana	Banyaknya jaringan komunikasi OPD	Unit	$\frac{\text{Jumlah Jaringan Komunikasi yg ada di Wilayah Kab. Pemalang}}{\text{Tahun}}$	BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO.	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB (BIDANG)
1	2	3	4	5	6
	prasarana dan jaringan komunikasi dan Informatika	Jumlah penyiaran radio/jumlah pengawasan isi siaran radio	Stasiun	Jumlah Stasiun Radio yg diawasi di Lingkup Kab. Pemalang / Tahun	BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		Cakupan layanan BTS	%	$\frac{\text{Jumlah Wilayah yg ada di Kab. Pemalang}}{\text{Jumlah Layanan BTS}} \times 100\%$	BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		Persentase OPD telah memiliki website	%	$\frac{\text{Jumlah SKPD yg ada di Kab. Pemalang}}{\text{Jumlah SKPD yg memiliki Website}} \times 100\%$	BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok Informasi Masyarakat di Kabupaten Pemalang	Kelompok	Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat yg ada di Kab. Pemalang / Tahun	BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
3.	Meningkatnya kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi	Cakupan pelayanan TI bagi masyarakat	Titik hotspot	$\frac{\text{Jumlah titik hotspot yang dibangun}}{\text{Jumlah titik hotspot yang dibutuhkan}} \times 100\%$	BIDANG E-GOVERNMENT
4.	Meningkatnya kualitas dan layanan informasi dan komunikasi melalui media massa	Persentase informasi pembangunan daerah yang dipublikasikan	%	$\frac{\text{Jumlah informasi pembangunan daerah yang dipublikasikan}}{\text{Total informasi pembangunan daerah}} \times 100\%$	BIDANG INFORMASI, KOMUNIKASI PUBLIK

Q. DINAS PERHUBUNGAN

NO.	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB (BIDANG)
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dan pelaporan kinerja pemerintah daerah	Nilai LkjIP	Nilai	Nilai LKjIP yang diperoleh	DISHUBKOMINFO
2.	Terwujudnya manajemen transportasi darat yang memadai guna mendukung keselamatan lalu lintas jalan	Jumlah kasus pelanggaran angkutan barang dan angkutan penumpang	Kasus	$\frac{\text{Jumlah Kasus Pelanggaran / Angkutan Barang dan Angkutan Penumpang}}{\text{Tahun}}$	BIDANG PERHUBUNGAN DARAT DAN LAUT
3.	Meningkatnya pelayanan teknis pemeriksaan berkala kendaraan bermotor	Persentase ketersediaan angkutan kota	%	$\frac{\text{Jumlah Angkutan}}{\text{Jumlah Penumpang}} \times 100\%$	BIDANG PERHUBUNGAN DARAT DAN LAUT
		Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	%	$\frac{\text{Jumlah Angkutan}}{\text{Jumlah Jaringan Jalan}} \times 100\%$	BIDANG PERHUBUNGAN DARAT DAN LAUT
		Tersedianya angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang	%	$\frac{\text{Jumlah Layanan Angkutan di Kab. Pemalang}}{\text{Jumlah Trayek yang ada}} \times 100\%$	BIDANG PERHUBUNGAN DARAT DAN LAUT
		Jumlah uji kendaraan bermotor wajib uji	Kali	$\frac{\text{Jumlah Uji Kendaraan Bermotor Wajib Uji}}{\text{Tahun}}$	BIDANG TEKNIS, SARANA DAN PRASARANA
		Jumlah kendaraan yang telah melakukan uji	Rasio	$\frac{\text{Rasio Kendaraan yang Telah Melaksanakan Uji}}{\text{Jumlah Kendaraan Wajib Uji}} \times 100\%$	BIDANG TEKNIS, SARANA DAN PRASARANA
4.	Terwujudnya pembangunan dan pemeliharaan sarana, prasarana dan fasilitas perhubungan	Persentase Tersedianya halte pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.	%	$\frac{\text{Jumlah Kebutuhan Halte di Kab. Pemalang}}{\text{Jumlah Halte yang Ada}} \times 100\%$	BIDANG PERHUBUNGAN DARAT DAN LAUT
		Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek	Terminal	$\frac{\text{Tersedianya Pembangunan Terminal Angkutan Penumpang}}{\text{Jumlah Kebutuhan}} \times 100\%$	BIDANG PERHUBUNGAN DARAT DAN LAUT

NO.	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB (BIDANG)
1	2	3	4	5	6
		Ketersediaan rambu-rambu lalu lintas	Rambu	$\frac{\text{Jumlah Rambu - rambu yg ada}}{\text{Jumlah Rambu - rambu seharusnya}} \times 100\%$	BIDANG TEKNIS, SARANA DAN PRASARANA

R. DINAS PERTANIAN

NO.	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB (BIDANG)
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dan pelaporan kinerja pemerintah daerah	Nilai LkjIP	Nilai	Nilai LKjIP yang diperoleh	DIPERTANHUT
2.	Peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Cakupan bina kelompok tani	%	$\frac{\text{Jumlah kelompok tani yg mendapat bantuan pemda tahun n}}{\text{Jumlah kelompok tani}} \times 100\%$	BIDANG TANAMAN PANGAN
		Produktivitas padi, jagung dan kedelai	Kw/Ha	$\frac{\text{Produksi padi, jagung dan kedelai}}{\text{Luas areal tanaman padi, jagung, kedelai}}$	BIDANG TANAMAN PANGAN
		Produksi pertanian tanaman pangan utama	Ton	Jumlah produksi pertanian tanaman pangan utama	BIDANG TANAMAN PANGAN
		Produksi pertanian tanaman hortikultura utama	Ton	Jumlah produksi pertanian tanaman hortikultura utama	BIDANG TANAMAN PANGAN
		Produksi komoditas perkebunan utama	Ton	Jumlah produksi komoditas perkebunan	BIDANG PERKEBUNAN
		Populasi komoditas peternakan utama	Ekor	Jumlah populasi ternak yang ada	BIDANG PETERNAKAN
		Meningkatnya produksi peternakan	Kg	Jumlah produksi daging unggas dan ruminansia serta telur	BIDANG PETERNAKAN
		Angka kematian (mortalitas) ternak	%	$\frac{\text{Jumlah banyaknya ternak yang mati}}{\text{Jumlah populasi ternak}} \times 100\%$	BIDANG PETERNAKAN
3.		Ketersediaan pangan utama :			

NO.	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB (BIDANG)
1	2	3	4	5	6
	Dipertahankannya ketersediaan pangan energi perkapita minimal 2.200 kkal/hari dan penyediaan protein perkapita minimal 57gr/hari	a. Ketersediaan energi perkapita	Kkal/kap/hr	$\frac{\text{Jumlah bahan makanan yang tersedia dikonsumsi penduduk per kap/hr} \times \text{BDD} \times \text{Kand Kalori}}{100}$	
		b. Ketersediaan protein perkapita	Gr/kap/hr	$\frac{\text{Jumlah bahan makanan yang tersedia dikonsumsi penduduk per kap/hr} \times \text{BDD} \times \text{Kand protein}}{100}$	
		Cadangan pangan pemerintah	ton	Jumlah cadangan pangan yang tersedia	
4.	Tercapainya peningkatan konsumsi pangan perkapita untuk memenuhi kecukupan energi minimal 2.000 kkal/hari dan protein sebesar 52 gr/hari	Konsumsi energi dan protein perkapita			
		a. Energi	Kkal/hr	Berdasarkan perhitungan PPH	
		b. Protein	Gr/hr	Berdasarkan perhitungan PPH	
5.	Meningkatnya penanganan keamanan pangan segar melalui peningkatan peran produsen dan kepedulian konsumen	Pola pangan Harapan	scor	$\% \text{ AKG} = \frac{\text{Energi masing - masing komoditas}}{\text{Angka Kecukupan Gizi}} \times 100\%$	

S. DINAS PERIKANAN

NO.	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB (BIDANG)
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dan pelaporan kinerja pemerintah daerah	Nilai LkjIP	Nilai	Nilai LKjIP yang diperoleh	DKP
2.	Meningkatkan hasil produksi perikanan	Produksi perikanan budidaya	Kg	Produksi perikanan budidaya menunjukkan jumlah produksi budidaya perikanan	BIDANG BUDIDAYA PERIKANAN
		Produksi perikanan tangkap	Kg	Produksi perikanan tangkap menunjukkan jumlah produksi perikanan tangkap	BIDANG PENGELOLAAN PENANGKAPAN IKAN
3.	Tersedianya tempat pelelangan ikan yang memenuhi syarat	Persentase tempat pelelangan ikan (TPI) dalam kondisi baik	%	$\frac{\text{Jumlah tempat pelelangan ikan dalam kondisi baik}}{\text{Seluruh jumlah TPI yang ada}} \times 100\%$	BIDANG PENGELOLAAN PENANGKAPAN IKAN
4.	Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan kelompok pelaku usaha perikanan	Jumlah kelompok pembudidaya ikan yang dibina	Kelompok	Jumlah kelompok pembudidaya ikan yang dibina	BIDANG BUDIDAYA PERIKANAN
		Cakupan bina kelompok nelayan	Kelompok	Jumlah kelompok nelayan yang dibina	BIDANG PENGELOLAAN PENANGKAPAN IKAN
		Cakupan kelompok usaha pengolahan ikan yang dibina	kelompok	Jumlah kelompok usaha pengolahan ikan yang dibina	BIDANG USAHA DAN PEMASARAN

T. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO.	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB (BIDANG)
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dan pelaporan kinerja pemerintah daerah	Nilai LkjIP	Nilai	Nilai LKjIP yang diperoleh	DPPKAD
2.	Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelola keuangan dan aset daerah	Penetapan Perda APBD tepat waktu	Tepat waktu	Penetapan Perda APBD sesuai dengan waktunya	BIDANG ANGGARAN
		Tersusunnya laporan keuangan	Tepat waktu	Penyusunan laporan keuangan tepat dengan waktunya	BIDANG AKUNTANSI
		Penetapan Perda pertanggungjawaban APBD tepat waktu	Tepat waktu	Penetapan Perda pertanggungjawaban APBD tepat waktu	BIDANG AKUNTANSI
		Akurasi penatausahaan barang milik daerah	Akurat	Kesesuaian catatan administrasi BMD dengan keberadaan fisik BMD	BIDANG ASET

NO.	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB (BIDANG)
1	2	3	4	5	6
		Ratio pengamanan aset	%	$\frac{\text{Luas lahan bersertifikat}}{\text{luas lahan yang seharusnya bersertifikat}} \times 100\%$	BIDANG ASET
		Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah	Nilai	Jenis opini BPK terhadap laporan keuangan daerah	DPPKAD
2.	Peningkatan pendapatan asli daerah	Ratio Pemanfaatan Aset	%	$\frac{\text{Realisasi dari pemanfaatan aset}}{\text{Total PAD}} \times 100\%$	BIDANG ASET

U. BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

NO.	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB (BIDANG)
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dan pelaporan kinerja pemerintah daerah	Nilai LkjIP	Nilai	Nilai LKjIP yang diperoleh	DPPKAD
2.	Peningkatan pendapatan asli daerah	Rasio realisasi PAD terhadap potensi / target PAD	%	$\frac{\text{Jumlah realisasi PAD dibagi dengan potensi}}{\text{Target PAD}} \times 100\%$	BIDANG PENDAPATAN
		Peningkatan pertumbuhan PAD	%	$\frac{\text{Kenaikan / penurunan PAD}}{\text{PAD tahun lalu}} \times 100\%$	BIDANG PENDAPATAN

V. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO.	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB (BIDANG)
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dan pelaporan kinerja pemerintah daerah	Nilai LkjIP SKPD	Nilai	Perhitungan nilai LKjIP	BPBD
2.	Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas pelaku penanggulangan bencana	Jumlah Desa Tangguh	Desa	Jumlah desa yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak-dampak bencana yang merugikan	SEKSI PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN

NO.	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB (BIDANG)
1	2	3	4	5	6
3.	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi penyusunan rencana penanggulangan bencana beserta pemantauan dan monev yang dilakukan	Persentase desa dalam kawasan rawan bencana yang terpetakan potensi/resiko bencananya	%	$\frac{\text{Jumlah Desa dalam kawasan rawan bencana yang terpetakan potensi resiko bencananya}}{\text{Jumlah desa dalam kawasan rawan bencana}} \times 100\%$	SEKSI PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN
4.	Meningkatnya pengerahan peralatan, pemberian bantuan dan logistik dalam rangka penanganan darurat bencana yang efektif dan efisien	Persentase (%) korban bencana skala kabupaten yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap yang dilaporkan	%	$\frac{\text{Jumlah korban bencana skala kabupaten yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap yang dilaporkan}}{\text{Jumlah korban bencana yang dilaporkan}} \times 100\%$	SEKSI KEDARURATAN DAN LOGISTIK
5.	Meningkatnya penanganan darurat bagi korban bencana untuk kebutuhan dasar dan bantuan sosial yang diperlukan	Persentase (%) korban bencana skala kabupaten yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat yang dilaporkan	%	$\frac{\text{Jumlah korban bencana skala kabupaten/kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat yang dilaporkan}}{\text{Jumlah korban bencana yang dilaporkan}} \times 100\%$	SEKSI KEDARURATAN DAN LOGISTIK
6.	Meningkatnya perlindungan dan pemulihan akibat dampak bencana, termasuk rehabilitasi dan rekonstruksi yang diperlukan	Cakupan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur Pasca Bencana Alam Lingkup Kabupaten	%	$\frac{\text{Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur Lingkup Kewenangan Kabupaten}}{\text{Seluruh Wilayah Pasca Bencana Alam}} \times 100\%$	SEKSI REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
7.	Meningkatnya kapasitas pelaku penanggulangan bencana dalam tindakan hitung cepat (rapid assesment) pasca bencana	Persentase Peserta Pelatihan Penghitungan Kerusakan dan Kerugian Akibat Bencana Alam Lingkup Kabupaten yang berkompeten	%	$\frac{\text{Peserta Pelatihan Penghitungan Kerusakan dan Kerugian Akibat Bencana Alam Lingkup Kabupaten yang berkompeten}}{\text{Seluruh Peserta Pelatihan Penghitungan Kerusakan dan Kerugian Akibat Bencana Alam Lingkup Kabupaten}} \times 100\%$	SEKSI REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

NO.	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB (BIDANG)
1	2	3	4	5	6
4.	Peningkatan koleksi perpustakaan	Tingkat Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Judul Exemplar	Jumlah koleksi judul buku yang tersedia di perpustakaan daerah Jumlah koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	KANTOR PERPUSARDA
5.	Terwujudnya penyelamatan, pengolahan, pelindungan dan pelestarian serta akses arsip untuk kepentingan pemerintah dan pelayanan public	Persentase arsip yang dialihmediakan	%	$\frac{\text{Jumlah dokumen/arsip daerah yang telah diduplikat dalam bentuk multimedia}}{\text{jumlah arsip yang tersedia}} \times 100\%$	KANTOR PERPUSARDA
		Persentase arsip yang dimusnahkan	%	$\frac{\text{Jumlah arsip yang dimusnahkan menggunakan metode baku}}{\text{jumlah arsip yang siap dimusnahkan}} \times 100\%$	KANTOR PERPUSARDA
6.	Terselenggaranya Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Daerah	Jumlah pengguna arsip	Orang	Banyaknya jumlah pengguna arsip pada masa satu tahun berjalan	KANTOR PERPUSARDA
7.	Terwujudnya tertib arsip di lingkungan pemerintah daerah, lembaga pendidikan, BUMD, organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan	Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang telah mengelola arsip secara baku	%	$\frac{\text{Jumlah OPD yang telah menerapkan arsip secara baku}}{\text{Jumlah seluruh OPD}} \times 100\%$	KANTOR PERPUSARDA
		Persentase Desa/Kelurahan yang telah mengelola arsip secara baku	%	$\frac{\text{Perbandingan jumlah Desa/Kelurahan yang telah menerapkan arsip secara baku}}{\text{jumlah Desa/Kelurahan}} \times 100\%$	KANTOR PERPUSARDA

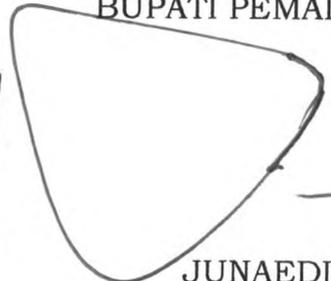
BB. KECAMATAN

NO.	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB (BIDANG)
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dan pelaporan kinerja pemerintah daerah	Nilai LKjIP	Nilai	Nilai LKjIP yang diperoleh	KECAMATAN
		Persentase penyerapan anggaran	%	$\frac{\text{Jumlah anggaran yang terserap}}{\text{Jumlah anggaran}} \times 100\%$	KECAMATAN
		Persentase partisipasi masyarakat dan lembaga masyarakat dalam musrenbang kelurahan	%	$\frac{\text{Jumlah lembaga dan tokoh masyarakat yang berpartisipasi dalam musrenbang kelurahan}}{\text{Jumlah lembaga dan tokoh masyarakat yang ada dalam kelurahan}} \times 100\%$	KECAMATAN YANG ADA KELURAHAN
2.	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan sumber daya aparatur desa binaan	Persentase kelengkapan administrasi desa binaan	%	$\frac{\text{Jumlah desa yang lengkap administrasi}}{\text{Jumlah desa binaan}} \times 100\%$	KECAMATAN

NO.	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB (BIDANG)
1	2	3	4	5	6
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Persentase meningkatnya kualitas pelayanan publik	%	$\frac{\text{Jumlah pelayanan yang terselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah pelayanan}} \times 100\%$	KECAMATAN
		Persentase penanganan pengaduan masyarakat	%	$\frac{\text{Jumlah pengaduan masyarakat yang tertangani}}{\text{Jumlah pengaduan masyarakat yang disampaikan}} \times 100\%$	KECAMATAN
		Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang difasilitasi dengan baik dan layak	%	$\frac{\text{Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang difasilitasi dengan baik dan layak}}{\text{Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) seluruhnya}} \times 100\%$	KECAMATAN YANG ADA KELURAHAN

NO.	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB (BIDANG)
1	2	3	4	5	6
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Persentase meningkatnya kualitas pelayanan publik	%	$\frac{\text{Jumlah pelayanan yang terselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah pelayanan}} \times 100\%$	KECAMATAN
		Persentase penanganan pengaduan masyarakat	%	$\frac{\text{Jumlah pengaduan masyarakat yang tertangani}}{\text{Jumlah pengaduan masyarakat yang disampaikan}} \times 100\%$	KECAMATAN
		Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang difasilitasi dengan baik dan layak	%	$\frac{\text{Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang difasilitasi dengan baik dan layak}}{\text{Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) seluruhnya}} \times 100\%$	KECAMATAN YANG ADA KELURAHAN

Paraf Hirarkhi	
Kasubbag	
Kabag	
Asisten	
Sekda	

BUPATI PEMALANG,

 JUNAEDI